

## Melampaui Legalitas Administratif: Sintesis Etika Magnis-Suseno dalam Menakar Integritas Kebijakan Makan Bergizi Gratis

Andri Fransiskus Gultom<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

<sup>1</sup> andri.franz@unikama.ac.id\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 6 Januari 2026;  
Revised: 8 Februari 2026;  
Accepted: 24 Maret 2026.

### Kata kata kunci:

Integritas Kebijakan;  
Legalitas Administratif;  
Franz Magnis-Suseno;  
Makan Bergizi Gratis;  
Etika Tanggung Jawab.

---

### : ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah idealnya menjadi wujud kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Namun, munculnya berbagai polemik seperti kasus keracunan makanan dan inefisiensi anggaran mengindikasikan adanya krisis etika di tingkat pengelola. Penelitian ini bertujuan membedah nihilnya etika normatif dalam tata kelola kebijakan tersebut melalui perspektif filsafat moral Franz Magnis-Suseno. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap tiga informan (orang tua murid, siswa, dan pengamat sosial) serta observasi terhadap fenomena polemik kebijakan di ruang publik. Teknik analisis data menggunakan pembacaan tekstual, verstehen, dan interpretasi filosofis untuk mensintesis data empiris dengan karya Etika Dasar. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kegagalan kebijakan berakar pada hilangnya "rumah etika" di hulu pengambilan keputusan yang merusak martabat manusia demi ambisi teknokratis. Novelty penelitian ini terletak pada tawaran restorasi moral melalui reprioritasi anggaran berbasis etika kepedulian dan internalisasi nilai filosofis sebagai solusi atas dehumanisasi birokrasi dalam program MBG.

---

### ABSTRACT

*Beyond Administrative Legality: A Synthesis of Magnis-Suseno's Ethics in Assessing the Integrity of the Free Nutritious Meal Policy. The government's Free Nutritious Meals (MBG) program ideally embodies the state's presence in ensuring the welfare of the people. However, the emergence of various polemics such as food poisoning cases and budget inefficiencies indicates an ethical crisis at the management level. This study aims to examine the absence of normative ethics in the governance of this policy through the perspective of Franz Magnis-Suseno's moral philosophy. The research method used a qualitative case study approach. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews with three informants (parents, students, and social observers) and observations of the policy polemic phenomenon in the public sphere. Data analysis techniques used textual reading, verstehen, and philosophical interpretation to synthesize empirical data with the work of Basic Ethics. The results reveal that the policy failure is rooted in the loss of the "house of ethics" at the upstream of decision-making, which undermines human dignity for the sake of technocratic ambitions. The novelty of this research lies in the offer of moral restoration through budget reprioritization based on an ethics of care and the internalization of philosophical values as a solution to the dehumanization of bureaucracy in the MBG program.*

---

### Keywords:

Policy Integrity;  
Administrative Legality;  
Franz Magnis-Suseno;  
Free Nutritious Meals;  
Ethical Responsibility.

---

Copyright © 2026 (Andri Fransiskus Gultom). All Right Reserved

How to Cite : Gultom, A. F. (2026). Melampaui Legalitas Administratif: Sintesis Etika Magnis-Suseno dalam Menakar Integritas Kebijakan Makan Bergizi Gratis. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1). <https://doi.org/10.56393/decive.v6i1.4353>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Dalam tata kelola pemerintahan, kepatuhan terhadap prosedur formal sering kali disalahpahami sebagai puncak dari integritas kebijakan (Lumbanraja, et al., 2025; Saga, et al., 2026). Namun, fenomena polemik anggaran pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan bukti nyata bahwa legalitas administratif semata tidak cukup untuk menjamin keadilan bagi publik (Kiftiyahet al., 2025; Dama, Mayasari, & Situmorang, 2025). Seperti yang ditegaskan oleh Magnis-Suseno (2016), moralitas harus melampaui sekadar ketaatan pada hukum positif; ia menuntut kesadaran batin untuk bertanggung jawab atas nasib sesama warga negara yang menjadi pemegang kedaulatan sesungguhnya. Tanpa pijakan etis ini, kebijakan publik hanya akan menjadi instrumen teknokrasi yang dingin, di mana pengadaan barang non-esensial dilegalkan secara administratif meskipun secara moral mencederai rasa keadilan masyarakat yang sedang menghadapi krisis gizi.

Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan sebuah sintesis etika yang menuntut aparaturnegara untuk bergerak melampaui batas-batas legalitas administratif menuju integritas yang substansial. Melalui lensa "Etika Dasar", integritas kebijakan ditakar bukan dari seberapa rapi laporan audit di atas kertas, melainkan dari seberapa besar kebijakan tersebut menghargai martabat manusia dan memenuhi tanggung jawab moral yang melekat pada kekuasaan. Restorasi "berumah dalam etika" dalam birokrasi menjadi imperatif agar program MBG tidak terjebak dalam nihilisme etis yang mengutamakan fasilitas fisik daripada perlindungan nyawa. Dengan demikian, sintesis pemikiran Magnis-Suseno diharapkan mampu memberikan orientasi kritis dalam membedah paradoks antara ambisi teknokratis pemerintah dan realitas kerentanan sosial di lapangan.

Kajian mengenai etika dalam kebijakan publik di Indonesia telah berkembang pesat dengan fokus yang beragam namun saling melengkapi. Suryono (2023) mengawali diskursus ini dengan menekankan bahwa akuntabilitas moral pada program jaminan sosial sangat bergantung pada integritas personal pejabat publik. Sejalan dengan itu, Rahmawati & Nowanda (2025) menyoroti transparansi sebagai pilar utama *good governance* untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, Haryatmoko (2022) mengeksplorasi pemikiran Franz Magnis-Suseno mengenai pentingnya kompas moral bagi pejabat agar tetap teguh di tengah arus kepentingan pragmatis. Ketiga studi ini secara kolektif memberikan landasan teoretis yang kokoh mengenai urgensi etika dalam birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Namun demikian, terdapat *research gap* yang krusial ketika membedah fenomena kontemporer seperti kebijakan MBG. Penelitian terdahulu cenderung terjebak pada analisis administratif dan pencegahan korupsi secara umum, sehingga sering kali luput dalam melihat dimensi kemanusiaan yang lebih dalam. Kekosongan ini menjadi sangat relevan ketika kebijakan publik dihadapkan pada kontradiksi prioritas anggaran, di mana kebutuhan gizi dasar masyarakat harus bersaing dengan pengadaan barang mewah seperti motor listrik dan tablet. Selain itu, adanya keracunan karena MBG (Aan Pratiwi, Purba, & Rahayu, 2025). Di sinilah letak urgensi untuk melampaui analisis teknokratis menuju evaluasi etis yang lebih radikal.

Pemilihan pemikiran Franz Magnis-Suseno dalam penelitian ini didasarkan pada keunggulan metodologi "Etika Dasar" yang melampaui keterbatasan utilitarianisme maupun deontologi Kantian. Berbeda dengan utilitarianisme yang berisiko mengorbankan hak minoritas demi kalkulasi kebahagiaan mayoritas, atau deontologi yang kadang terjebak pada ketaatan hukum formal yang kaku, Etika Dasar Magnis-Suseno menekankan pada otonomi moral dan suara hati. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguji kebijakan MBG bukan hanya dari sisi kemanfaatan atau legalitasnya, melainkan pada komitmen batiniah negara dalam menjunjung tinggi martabat manusia sebagai subjek utama pembangunan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan konsep "Berumah dalam Etika" untuk membedah fenomena "dehumanisasi birokrasi". Fenomena ini muncul ketika bias prioritas anggaran

yang lebih mendahulukan komoditas daripada nutrisi, bukan lagi sekadar masalah manajerial, melainkan sebuah "kegagalan ontologis" di mana birokrasi kehilangan hakikatnya sebagai pelayan kehidupan. Dengan lensa ini, penelitian akan menyingkap bagaimana legalitas administratif sering kali digunakan untuk melegitimasi kebijakan yang mencederai keadilan distributif, sekaligus menawarkan reorientasi agar kebijakan publik kembali pada fungsinya sebagai ruang hunian yang manusiawi dan adil.

Ketimpangan antara tujuan mulia MBG dan realitas di lapangan menciptakan apa yang disebut sebagai krisis integritas kebijakan. Magnis-Suseno (2016) mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa moralitas akan berubah menjadi alat penindasan yang halus, di mana rakyat hanya dipandang sebagai objek teknokratis. Ketika anggaran negara yang terbatas dialokasikan untuk fasilitas sekunder birokrasi di tengah risiko keselamatan fisik siswa (kasus keracunan), maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab dasar negara untuk melindungi nyawa. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah MBG bukanlah sekadar kegagalan logistik, melainkan kegagalan ontologis dalam memahami makna pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan mendasar: Pertama, bagaimana diskoneksi antara legalitas administratif dan tanggung jawab moral terjadi dalam implementasi program MBG ?. Kedua, sejauh mana perspektif etika normatif Franz Magnis-Suseno dapat digunakan untuk menakar integritas kebijakan yang mengalami bias prioritas anggaran? Ketiga, bagaimana restorasi moral melalui konsep "berumah dalam etika" dapat menjadi solusi bagi pemulihan kepercayaan publik terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) ?.

Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada pengayaan studi filsafat kewarganegaraan dengan memberikan analisis kritis terhadap kebijakan kontemporer di Indonesia. Secara praktis, tulisan ini menawarkan rekomendasi bagi para pengambil kebijakan untuk melakukan internalisasi nilai-nilai etis dalam birokrasi. Dengan melampaui sekadar kepatuhan terhadap aturan tertulis, diharapkan setiap aparatur negara dapat kembali menyadari bahwa kedaulatan moral berada di tangan rakyat, sehingga kebijakan publik benar-benar berorientasi pada martabat manusia, bukan sekadar ambisi teknokratis yang hampa makna.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Sugiyono, 2020). Upaya mengeksplorasi kasus secara mendalam terutama pada krisis etik dalam kebijakan MBG. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memahami kompleksitas perilaku manusia dan latar belakang filosofis di balik pengambilan keputusan publik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap enam informan dari dua orang tua murid, dua siswa, guru, dan pengamat sosial. Lalu, ada observasi sistematis terhadap diskursus polemik kebijakan di ruang publik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi pembacaan tekstual dan *verstehen* untuk menangkap makna subjektif dari tindakan para aktor kebijakan. Proses analisis ini dipertajam dengan interpretasi filosofis guna mensintesis temuan empiris di lapangan dengan kerangka konseptual Etika Dasar karya Franz Magnis-Suseno. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan menghasilkan interpretasi yang melampaui deskripsi administratif menuju pemahaman hakikat integritas moral dalam birokrasi.

## **Hasil dan Pembahasan**

Program MBG hadir dengan ambisi besar, namun langkah awalnya justru diwarnai oleh serangkaian efisiensi yang dipertanyakan dan risiko teknis yang fatal (Azzahra, Nursanti, & Arindawati, 2025). Data menunjukkan adanya kasus keracunan makanan yang menimpa siswa di beberapa titik uji

coba, yang menandakan lemahnya kontrol kualitas dan standar sanitasi di tingkat unit layanan atau dapur MBG. Alih-alih memprioritaskan keamanan pangan, perhatian publik justru teralihkan oleh kebijakan pengadaan yang ganjil.

Kepala BGN mengungkapkan posisi ribuan motor listrik yang direncanakan untuk distribusi MBG sebagai bagian dari upaya modernisasi logistik. Namun, urgensi penggunaan motor listrik di tengah laporan keracunan makanan memicu kritik tajam mengenai prioritas anggaran. Lebih jauh lagi, wacana pengadaan perangkat tablet bagi pengelola dan bahkan kaos kaki menambah panjang daftar belanja yang dianggap tidak menyentuh substansi gizi anak sekolah. Ketika anggaran yang bersumber dari pajak rakyat dialokasikan untuk hal-hal yang bersifat kosmetik atau turunan yang tidak mendesak di tengah kegagalan fungsi utama (keamanan pangan), maka di sanalah letak kebocoran etis yang nyata.

Untuk mengonfirmasi problem MBG, penulis mengambil data yang dilakukan dengan mewawancarai informan. Berikut representasi informan yaitu: (1) orangtua murid; (2) murid di salah satu SMA Swasta di kota Malang; (3) seorang guru; (4) seorang pengamat sosial. Berikut kutipan hasil wawancaranya.

Orangtua murid dengan inisial FT menyatakan demikian tentang MBG.

"Saya merasa program Makan Bergizi Gratis ini terasa aneh karena urusan makanan justru melebar ke pengadaan motor listrik, kaus kaki, dan tablet. Semua pengadaan barang non-esensial ini terjadi secara tiba-tiba tanpa urgensi yang jelas bagi gizi anak kami. Kami sebagai orang tua menaruh curiga terhadap transparansi pengelolaan anggarannya. Seharusnya, dana pajak rakyat difokuskan pada kualitas makanan, bukan pada fasilitas yang tidak relevan."

Penulis juga menanyakan kepada seorang murid SMA dengan inisial MR. Ia mengungkapkan demikian,

"Program MBG ini memang nyata karena kami benar-benar mendapatkan jatah makanan di sekolah. Namun, ada beberapa teman saya yang terang-terangan tidak mau menerima atau memakan paket MBG tersebut. Mereka mengaku sangat takut akan risiko keracunan makanan yang beritanya sudah menyebar di beberapa daerah. Kami jadi merasa was-was karena keamanan pangannya terlihat masih sangat lemah."

Seorang guru, dengan inisial PA, memberi pernyataan demikian,

"Karena sudah menjadi kebijakan pemerintah, kami menerima program MBG di sekolah. Pelaksanaan teknis di awal program itu berjalan, kami memang disibukkan dengan urusan mengatur distribusi. Namun, program ini berjalan di sekolah kami."

Informan berikutnya yang penulis tanyakan adalah seorang pengamat sosial di kota Malang dengan inisial LW. Bapak LW secara akademis menyatakan,

"Pihak sekolah pada umumnya berada dalam posisi dilematis sehingga mereka hanya menerima saja apa yang diturunkan dalam program MBG ini. Namun secara mendasar, kebijakan ini sangat bermasalah karena tata kelola anggarannya yang tidak transparan kepada publik. Ada indikasi kuat bahwa kebijakan ini justru memotong anggaran sektor pendidikan yang jauh lebih krusial. Hal ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap tanggung jawab moral kepada warga negara sebagai pemegang kedaulatan. Pemerintah tampaknya lebih memprioritaskan ambisi teknokratis daripada prinsip keadilan distribusi yang berpihak pada rakyat."

Untuk meringkas data verbatim di atas, tabel dan kode tema dideksripsikan dari para informan mengenai problematika kebijakan MBG. Pengodean ini bertujuan untuk memetakan pola diskoneksi

antara regulasi formal dengan realitas kebutuhan dasar subjek warga negara di lapangan. Melalui klasifikasi tema tersebut, penelitian ini dapat mengidentifikasi secara presisi titik-titik krusial terjadinya krisis integritas dan dehumanisasi birokrasi dalam pengelolaan program tersebut.

**Tabel 1.** Pengkodean Data Verbatim Informan

<b>Informan</b>	<b>Pernyataan Kunci</b>	<b>Kode Tema</b>
FT (Orang tua murid)	"Urusan makanan justru melebar ke pengadaan motor listrik, kaus kaki, dan tablet... tanpa urgensi yang jelas bagi gizi anak kami."	Tema 1: Alienasi Prioritas Anggaran
MR (Murid SMA)	"Ada beberapa teman saya yang terang-terangan tidak mau menerima... sangat takut akan risiko keracunan makanan."	Tema 2: Ketakutan Eksistensial & Kerentanan Pangan
PA (Guru)	"Pihak sekolah pada umumnya berada dalam posisi dilematis sehingga mereka hanya menerima saja... disibukkan dengan urusan mengatur distribusi."	Tema 3: Dilema Birokrasi & Beban Administratif
LW (Pengamat Sosial)	"Ada indikasi kuat bahwa kebijakan ini justru memotong anggaran sektor pendidikan... pengabaian terhadap tanggung jawab moral."	Tema 4: Kegagalan Ontologis & Ketidakadilan Distributif

Berdasarkan data di atas, terlihat pola masalah sistemik dalam kebijakan MBG yang melampaui isu teknis. Pertama, terjadi pengabaian kebutuhan esensial (gizi) demi pengadaan fasilitas non-esensial yang tidak relevan. Kedua, rendahnya jaminan keamanan pangan menimbulkan kecemasan mendalam di tingkat siswa. Ketiga, dari perspektif sosial, kebijakan ini dinilai mengabaikan kedaulatan warga negara dengan lebih memprioritaskan ambisi teknokratis di atas keadilan distribusi. Keempat, birokrasi sekolah berada dalam posisi pasif dan dilematis, terjepit antara kewajiban menjalankan instruksi pemerintah dan realita di lapangan.

Temuan empiris yang terangkum dalam Tabel 1 menunjukkan adanya diskoneksi mendalam antara kebijakan negara dan realitas kebutuhan subjek warga negara. Melalui lensa pemikiran Franz Magnis-Suseno, fenomena ini tidak dapat lagi dilihat sekadar sebagai kendala teknis atau kesalahan manajerial dalam distribusi anggaran. Pernyataan informan FT mengenai pengalihan dana gizi ke barang non-esensial mencerminkan hilangnya "kepekaan etis" yang seharusnya menjadi fondasi setiap kebijakan publik. Secara filosofis, ini adalah manifestasi dari kebijakan yang kehilangan orientasi pada martabat manusia, di mana negara lebih mengutamakan ambisi teknokratis yang mekanistik daripada tanggung jawab moral untuk memenuhi hak dasar rakyatnya.

Analisis terhadap data verbatim ini mengungkap bahwa krisis yang terjadi bukanlah kegagalan etika individual semata, melainkan sebuah kegagalan etika institusional yang sistemik dalam BGN. Jika etika individual berfokus pada integritas personal pejabat, sebagaimana disinggung oleh Suryono (2023), maka etika institusional menyoroti bagaimana sistem itu sendiri memproduksi ketidakadilan. Ketakutan eksistensial yang dirasakan informan MR dan rekan-rekannya terhadap risiko keracunan pangan membuktikan bahwa sistem tidak mampu memberikan rasa aman sebagai syarat minimal eksistensi manusia (Magnis-Suseno, 1987). Kegagalan ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi telah terlepas dari tujuan hakikinya untuk melayani kehidupan, beralih menjadi mesin yang hanya mementingkan prosedur administratif tanpa substansi nilai.

Dalam perspektif "Etika Dasar" Magnis-Suseno, kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara atas gizi merupakan bentuk keadilan distributif yang mutlak. Namun, pengamatan informan LW mengenai pemotongan anggaran pendidikan demi MBG menyingkap adanya "bias prioritas" yang bersifat destruktif. Sintesis antara data ini dengan teori Magnis-Suseno menghasilkan proposisi bahwa ketika legalitas digunakan untuk melegitimasi kebijakan yang mencederai hak hidup, maka hukum tersebut telah kehilangan validitas etisnya. Di sini, terjadi benturan antara utilitarianisme yang dangkal,

mengejar angka statistik partisipasi makan gratis dengan tuntutan etis untuk memperlakukan manusia sebagai tujuan, bukan sebagai sarana untuk mencapai target pencitraan politik.

Lebih jauh lagi, fenomena "dehumanisasi birokrasi" yang ditemukan di lapangan, sebagaimana dialami informan PA yang terjepit dalam dilema distribusi, menegaskan hilangnya otonomi moral dalam sistem pemerintahan. Magnis-Suseno (2014) menekankan bahwa etika publik harus mampu menjadikan negara sebagai "rumah" yang melindungi dan memanusiakan warga negaranya. Namun, fakta bahwa pihak sekolah hanya menjadi penerima pasif dari kebijakan yang bermasalah secara anggaran menunjukkan bahwa birokrasi kita sedang mengalami alienasi. Birokrasi tidak lagi "berumah dalam etika," melainkan terjebak dalam sangkar besi formalisme yang mengabaikan suara hati dan realitas kerentanan pangan di lapangan.

Untuk mengeksplisitkan sintesis, tabel berikut menjadi upaya untuk menakar integritas kebijakan MBG melalui lensa pemikiran Franz Magnis-Suseno.

**Tabel 2.** Sintesis: Data Lapangan vs. Perspektif Magnis-Suseno

<b>Data Verbatim (Temuan Lapangan)</b>	<b>Konsep Etika Magnis-Suseno</b>	<b>Sintesis Interpretatif</b>
FT & LW: Pengalihan anggaran gizi ke motor listrik/tablet dan pemotongan dana pendidikan. MR: Ketakutan siswa akan keracunan pangan karena standar keamanan yang rendah.	Keadilan Distributif & Hak Dasar: Negara wajib mendahulukan kebutuhan primer warga di atas ambisi teknokratis. Martabat Manusia sebagai Subjek: Manusia tidak boleh dijadikan objek atau sarana eksperimen kebijakan.	Kebijakan mengalami "alienasi prioritas"; anggaran digunakan sebagai alat legitimasi proyek non-esensial, mengabaikan hak atas gizi dasar. Adanya "ketakutan eksistensial" menunjukkan kegagalan institusional dalam menjamin keamanan sebagai prasyarat minimal kemanusiaan.
PA: Pihak sekolah terjebak dalam dilema administratif dan hanya menerima instruksi.	Otonomi Moral & Suara Hati: Pejabat publik harus memiliki keberanian moral untuk mengoreksi sistem yang timpang.	Terjadi "dehumanisasi birokrasi"; sistem bekerja secara mekanistik tanpa melibatkan pertimbangan moral batiniah para pelaksananya.

Krisis dalam kebijakan MBG, sebagaimana terekam dalam data lapangan, bukan sekadar kegagalan manajerial, melainkan sebuah kegagalan ontologis pada etika institusional. Mengacu pada pemikiran Magnis-Suseno (1987), kebijakan publik harus berakar pada orientasi terhadap martabat manusia. Ketika anggaran gizi justru "melebar" ke pengadaan barang non-esensial seperti motor listrik, negara telah melakukan objektifikasi terhadap warga negaranya, memperlakukan kebutuhan rakyat sebagai instrumen pencapaian target industri atau administratif. Hal ini kontras dengan teori Etika Publik Haryatmoko (2022) yang menekankan bahwa kebijakan harus memiliki "kompas moral" yang jelas untuk mencegah pragmatisme sempit yang mengorbankan kesejahteraan umum demi kepentingan teknokratis.

Secara lebih mendalam, fenomena ini menunjukkan benturan antara utilitarianisme dangkal dengan etika kewajiban (deontologi). Kebijakan MBG tampak mengejar kemanfaatan bagi orang banyak dalam angka statistik, namun secara moral cacat karena mengabaikan hak-hak esensial lainnya, seperti anggaran pendidikan yang dipotong. Jika dibandingkan dengan pemikiran John Rawls mengenai keadilan sebagai *fairness*, kebijakan ini mencederai prinsip perbedaan (*difference principle*), di mana distribusi sumber daya seharusnya memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Dalam konteks Indonesia, Magnis-Suseno (2014) menegaskan bahwa negara harus menjadi "rumah" yang melindungi; namun, ketidaktransparan anggaran dan risiko keamanan pangan justru menciptakan kondisi di mana warga merasa terasing dan tidak terlindungi di rumahnya sendiri.

Sebagai sintesis, krisis ini menunjukkan bahwa birokrasi Indonesia sedang mengalami alienasi moral. Temuan bahwa sekolah hanya menjadi penerima pasif dari kebijakan yang dilematis mengonfirmasi hilangnya otonomi moral dalam struktur pemerintahan. Perbandingan dengan pemikiran Immanuel Kant tentang imperatif kategoris mengingatkan kita bahwa setiap individu (termasuk siswa sebagai penerima manfaat) harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar angka dalam laporan pertanggungjawaban. Tanpa adanya reorientasi menuju konsep "Berumah dalam Etika", di mana legalitas administratif diselaraskan dengan keadilan distributif. Kebijakan MBG hanya akan menjadi instrumen dehumanisasi yang melegitimasi ketidakadilan di bawah payung hukum formal (Fikri, 2025; Yelvianti, 2025).

Kebijakan MBG dengan demikian memerlukan reorientasi ontologis dari sekadar manajemen logistik menjadi praksis etis. Proposisi teoretis baru yang muncul adalah: keberlanjutan sebuah kebijakan publik tidak ditentukan oleh kecanggihan fasilitas pendukung (seperti tablet atau motor listrik), melainkan oleh kemampuannya untuk mengintegrasikan keadilan distributif dengan penghormatan terhadap martabat manusia secara utuh. Kegagalan institusional BGN dalam menyelaraskan anggaran dengan kebutuhan gizi primer adalah bukti nyata dari praktik "politik tanpa etika" yang, menurut Magnis-Suseno, hanya akan menjauhkan negara dari tujuannya untuk mewujudkan kebaikan bersama (*bonum commune*).

## Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis integritas dalam implementasi program MBG bukan sekadar masalah teknis atau kegagalan logistik, melainkan sebuah kegagalan ontologis dan institusional yang berakar pada pengabaian etika normatif dalam birokrasi. Temuan menunjukkan adanya diskoneksi antara legalitas administratif dengan tanggung jawab moral, di mana prioritas anggaran justru teralienasi pada pengadaan barang non-esensial sementara standar keamanan pangan bagi siswa masih rentan. Melalui lensa etika Franz Magnis-Suseno, fenomena ini mengindikasikan terjadinya "dehumanisasi birokrasi" yang menempatkan ambisi teknokratis di atas martabat manusia dan keadilan distributif. Oleh karena itu, restorasi "berumah dalam etika" menjadi imperatif agar kebijakan publik kembali pada hakikatnya sebagai pelayan kehidupan yang menjunjung tinggi suara hati dan otonomi moral para pelaksananya. Konsep "berumah dalam etika" dapat dioperasionalkan dalam struktur BGN melalui langkah-langkah konkret berikut untuk melampaui formalitas administratif: pertama, Mekanisme *Ethical Clearance* dalam Pengadaan Barang, BGN harus membentuk Komite Etika Independen yang bertugas memberikan *ethical clearance* (persetujuan etis) sebelum proses pengadaan barang dimulai. Lalu, internalisasi "otonomi moral" dalam standar operasional prosedur dengan memberikan ruang bagi unit pelaksana (seperti sekolah atau dapur desa) untuk melakukan *ethical dissent* (penolakan etis) jika instruksi pusat berisiko membahayakan keselamatan siswa atau tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

## Referensi

- Aan Pratiwi, I., Purba, R., & Rahayu, N. A. (2025). Penyebab Keracunan dan Dinamika Disinformasi pada Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Sekolah. *Journal of Elementary Education Innovations*, 1(1), 26–32. Retrieved from <https://pandas-pasca.unpak.ac.id/index.php/pandas/article/view/6>
- Azzahra, M. S., Nursanti, S., & Arindawati, W. A. (2025). Analisis framing pemberitaan pro dan kontra Program Makanan Bergizi Gratis. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 12(2), 775-788. <https://doi.org/10.37676/professional.v12i2.9862>
- Dama, M., Mayasari, A. D., & Situmorang, L. (2025). The Controversy of the Free Meal Programme in the General Election 2024 in Indonesia. *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, 2(3), 179-191. <https://doi.org/10.69875/djosse.v2i3.200>
- Fikri, A. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Konstitusionalisme. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 437-459. <https://doi.org/10.24967/jcs.v10i2.4576>

- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi deliberatif: Menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jürgen Habermas*. Kanisius.
- Hardiman, F. B. (2020). Franz Magnis-Suseno, etika dialog dan penalaran publik agama-agama. *International Journal of Public Theology*, 14(2), 187–205. <https://doi.org/10.1163/15697320-12341611>
- Haryatmoko. (2022). Etika publik dan integritas pejabat dalam perspektif Franz Magnis-Suseno. *Jurnal Etika Kontemporer*, 12(2), 112–130.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika publik: Jalan menuju integritas birokrasi*. Kompas.
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101-112. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>
- Lumbanraja, V., Rustiyana, R., Ibrahim, A. H. H., & Riyanto, A. (2025). *Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia: Konsep, Perkembangan, Prinsip dan Peran*. Star Digital Publishing.
- Magnis-Suseno, F. (1986). *Kuasa dan Moral*. Gramedia Pustaka Utama.
- Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius.
- Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pratiwi, I. A., Purba, R., & Rahayu, N. A. (2025). Penyebab Keracunan dan Dinamika Disinformasi pada Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Sekolah. *Journal of Elementary Education Innovations*, 1(1), 26-32.
- Rahmawati, S., & Nowanda, D. (2025). Peran Etika Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(1), 324-333. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i1.53>
- Saga, B., Nurhasan, Y., Septanta, R., & Khuzaeni, K. (2026). Pengaruh Moralitas Pajak, Good Governance dan Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 9(1), 343-349. <https://doi.org/10.37481/sjr.v9i1.1350>
- Sari, I. D. A., Abadi, M. T., Usman, I., & Hartini, S. (2025). *Dua Wajah Etika: Menelusuri Moralitas di Balik Organisasi Profit, Non-Profit, dan Lembaga Publik*. CV Eureka Media Aksara.
- Spaltani, B. G. (2024). Digitalisasi Birokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Etika Pejabat Publik. *Jurnal Suara Keadilan*, 25(1), 26–39. <https://doi.org/10.24176/sk.v25i1.13353>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, A. (2023). Akuntabilitas Moral dalam Implementasi Program Jaminan Sosial. *Jurnal Administrasi Publik* 15(3), 201-215. <https://doi.org/10.31289/jap.v13i2.10125>
- Tempo. "Kepala BGN Ungkap Posisi Ribuan Motor Listrik MBG Saat Ini." Tempo.co, diakses April 15, 2026. <https://www.tempo.co/politik/kepala-bgn-ungkap-posisi-ribuan-motor-listrik-mbg-saat-ini-2127975>.
- Yelvianti, T. (2025). Efektivitas Program Makan Gizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo terhadap Kualitas Gizi dan Pendidikan para Siswa di Indonesia. *Jurnal Sehat Mandiri*, 20(2), 288-298. <https://doi.org/10.33761/jsm.v20i2.2030>